

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya terselenggaranya pendidikan dengan baik tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut sangat menentukan maju dan mundurnya dunia pendidikan. Artinya keterlibatan semua pihak merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Apabila pendidikan hanya bertumpu pada pemerintah dan melupakan peran orang tua siswa serta masyarakat, maka pelaksanaan pendidikan di sekolah telah kehilangan peran potensi strategis yang dapat memberikan sumbangsih yang sangat bermakna bagi kemajuan dunia pendidikan di sekolah. Padahal reformasi sekolah diarahkan untuk mengatasi kelemahan masyarakat dalam bidang pendidikan¹. Salah satu cara untuk mengatasi kelemahan tersebut, perlu upaya penguatan partisipasi masyarakat, sehingga orang tua siswa, sebagai bagian dari masyarakat perlu dilibatkan untuk ikut bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan.

Dalam manajemen berbasis sekolah, partisipasi seluruh warga sekolah (baca; orang tua siswa dan masyarakat) memegang peran penting untuk mendukung berbagai macam program kerja yang direncanakan oleh pihak sekolah sebagai kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah, tentu tidak dapat dilepaskan dari tuntutan informasi, dan teknologi yang senantiasa selalu berubah semakin hari

¹Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 71

semakin maju. Apabila antara teori kebutuhan dihubungkan dengan tuntutan kemajuan informasi dan teknologi yang semakin hari semakin maju, maka kebutuhan berbagai aspek dunia pendidikan di sekolah pun semakin besar. Pemenuhan terhadap berbagai aspek, seperti tersedianya sarana dan pra sarana dalam rangka menunjang pembelajaran yang bermutu merupakan suatu tuntutan yang menjadi kepastian dan harus dipenuhi oleh pihak sekolah. Demikian juga dengan aspek lainnya seperti kualitas guru, manajemen pengelolaan sekolah.

Pemenuhan kebutuhan berbagai aspek pendidikan di sekolah tidak bisa dilepaskan dengan pendidikan sebagai suatu proses, yang berakhir pada hasil. Artinya proses berlangsungnya pendidikan untuk menentukan sebuah hasil sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek tersebut. Aspek-aspek tersebut meliputi; *Pertama*, siswa dan kondisi objektif orang tuanya; *Kedua*, guru dan kondisi objektif kompetensinya; *Ketiga*, sarana dan kondisi objektif ketersediaannya; *Keempat*, pengelola dan struktur organisasi sekolah serta kondisi objektif kepemimpinannya; *Kelima*, pengawas sekolah dengan kondisi objektif aktivitas kepengawasannya; *Keenam*, lingkungan (masyarakat) dan keterlibatannya.

Keenam aspek tersebut di atas dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah senantiasa selalu terkait. Akan tetapi yang cukup menentukan keberhasilan untuk meningkatkan mutu sekolah adalah peran pengelola dan peran organisasi sekolah yang terstruktur di sekolah serta kondisi objektif kepemimpinan sekolah itu sendiri. Permasalahan pengelolaan sekolah dan struktur organisasi sekolah merupakan permasalahan sekolah dalam konteks yang lebih universal. Permasalahan sekolah dalam konteks yang lebih universal tidak hanya

masalah peran kepala sekolah atau ruang lingkup sekolah secara mikro, melainkan sesuatu yang sudah menjadi budaya sekolah. Salah satu budaya sekolah yang selama ini ada, yaitu peran orang tua siswa dan masyarakat yang terstruktur pada sekolah dalam bentuk organisasi yang perannya sebagai mitra kerja sekolah. Dalam level sekolah sekarang mulai berkembang adalah adanya komite sekolah yang ikut mengatur dan menentukan kemajuan sekolah masing-masing. Mereka ikut berpikir bagaimana sekolah mau dimajukan”². Organisasi mitra kerja sekolah yang terstruktur pada tingkat satuan pendidikan yang dikenal dengan istilah komite sekolah di tingkat sekolah. Keberadaan komite sekolah pada tingkat satuan pendidikan dengan komite sekolah didasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Di dalam keputusan Menteri Pendidikan tersebut bahwa komite sekolah dinyatakan sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Adapun tujuan dari komite sekolah, untuk: 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. 3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

²J. Drost, SJ. *Dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) Sampai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), Cet. III. h. xx

Surut kebelakang dari realitas keberadaan komite sekolah ternyata peran komite sekolah ditingkat satuan pendidikan dapat memenuhi tujuan tersebut di atas disebabkan: 1) Komite sekolah hanya sekadar organisasi sekolah yang seluruh pengurusnya terdiri dari orang tua siswa di suatu sekolah, dan para masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibantu oleh para guru, tetapi belum berperan secara penuh dalam kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2); Pengurus Komite sekolah keberadaannya lebih banyak ditentukan oleh kepala sekolah, sedangkan orang tua siswa mendukung dan menyetujui saja atas ketentuan tersebut. 3) Komite sekolah tidak memiliki kebijakan otonom, melainkan sekadar legalisasi program kerja yang menjadi keinginan dan kemauan pihak sekolah.

Dominasi pihak sekolah dalam memainkan perannya, menyebabkan fungsi organisasi tersebut tidak dapat menjadi mitra kerja sekolah, tetapi menjadi alat bagi sekolah untuk berlindung dalam mengambil berbagai kebijakan yang berhubungan dengan mengatasnamakan orang tua siswa. Akibatnya berbagai potensi baik pikiran, maupun finansial yang mungkin sebagai peluang tidak dapat dijadikan faktor pendukung untuk kemajuan sekolah. Apabila realitas tersebut dipahami, maka diperlukan reformasi cara berpikir pihak sekolah agar semua potensi yang dimiliki sekolah dapat dijadikan sebagai peluang untuk mendukung kemajuan sekolah. Reformasi cara berpikir agar semua potensi yang dimiliki sekolah dapat dijadikan sebagai peluang untuk mendukung kemajuan sekolah, hal inilah yang melahirkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

MBS menghendaki agar semua pihak yang melingkari sekolah dijadikan sektor yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya pendidikan di sekolah. Artinya tidak hanya pihak sekolah, melainkan secara keseluruhan, yang meliputi; pemerintah, kepala sekolah, guru, tatalaksana sekolah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, pengusaha, Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM), praktisi pendidikan. Secara formal mereka inilah yang diharapkan bergerak dalam organisasi sekolah untuk membantu terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dalam konteks seperti ini pihak sekolah, dituntut untuk menjadi fasilitator, terbentuk dan terselenggaranya kemandirian sebuah organisasi yang menjadi mitra kerjanya.

Mengingat Komite Sekolah organisasi sekolah yang kepengurusannya hanya orang tua siswa, tentu sangat diharapkan agar sesuai dengan tuntutan MBS yang menghendaki keterlibatan semua pihak. Tuntutan tersebut mestinya melahirkan peran organisasi di tingkat satuan pendidikan, yaitu dengan melibatkan semua *stakeholder* di suatu sekolah. Keterlibatan *stakeholder* dalam komite sekolah, sangat sesuai dengan peran komite sekolah, sebagai: 1) Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rang transpansidan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Tuntutan tersebut, agar peran komite sekolah dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk orang tua siswa terhadap dunia pendidikan di satuan pendidikan di setiap sekolah baik partisipasi finansial, maupun nonfinansialnya. Oleh karena itu pihak sekolah berkewajiban mendorong komite sekolah untuk mengoptimalkan peran aktif komite sekolah, dan bukan untuk mengambil alih peran komite sekolah sebagai pihak sekolah, sebagaimana terjadi dewasa ini.

Sebagai organisasi, komite sekolah menjadi bagian lembaga dari suatu tingkat pendidikan di sekolah yang diharapkan mampu menunjang dan mengembangkan kelancaran dan kelangsungan terselenggaranya proses pendidikan dengan baik di sekolah. Hal ini disebabkan secara organisatoris komite sekolah memiliki hubungan koordinatif dengan pihak sekolah, walaupun komite sekolah bersifat independensi dari sekolah. Sifat independensi komite sekolah memberikan peluang kepada komite sekolah bertindak atas nama sekolah dengan sepengetahuan pihak sekolah.

Sifat independensi komite dalam konteks koordinatif sebagai suatu organisasi sekolah merupakan mitra sekolah yang diperlukan oleh sekolah dalam rangka untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Secara operasional sifat independensi komite sekolah dalam rangka menunjang kemajuan yang keberadaannya tidak hanya sebagai pelengkap dari sebuah tuntutan yang mesti ada di suatu sekolah, tetapi menjadi salah satu penentu untuk terlaksananya kebijakan sekolah secara eksis. Oleh karena itu keberadaannya diharapkan menjadi penggerak berbagai

aktivitas sekolah dalam perspektif pendidikan, yang berdampak adanya partisipasi aktif masyarakat secara luas dalam mendorong kemajuan sekolah.

Sekolah melalui komite sekolah dapat menggali berbagai potensi orang tua siswa dan potensi masyarakat yang dapat memberikan dukungannya dalam bentuk dana atau finansial lainnya terhadap program kerja sekolah. Penggalan potensi ditinjau dari sisi kepengurusan komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa, para tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, LSM, tentu merupakan perwakilan yang secara langsung dapat mengetahui berbagai kepentingan dan kebutuhan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran.

Secara yuridis formal komite sekolah mendapat legitimasi terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah baik kontrol terhadap pihak sekolah dalam penggunaan dana sekolah, khususnya yang berkaitan dengan iuran komite di sekolah, maupun pada program yang sudah disepakati antara pihak sekolah dengan pengurus komite, sehingga pihak sekolah tidak berbuat sebebasnya dalam menggunakan dana komite sekolah.

Dampak dari yuridis formal bagi komite sekolah tidak hanya mendapat kebebasan untuk menggali potensi atau kemampuan orang tua siswa, dan masyarakat dalam rangka terlaksananya program sekolah dengan baik. Akan tetapi komite sekolah dapat melakukan suatu kajian terhadap kondisi objektif sekolah, sehingga dapat memberikan masukan berupa pemikiran, ide-ide yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Disamping memberikan jalan keluar secara teknis terhadap pemikiran dan ide-ide yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah, dalam bentuk usaha nyata.

Berdasarkan sifat independensi tersebut dapat dipahami bahwa komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah merupakan badan otonomisasi di suatu sekolah dalam menjalankan kerjanya. Oleh karena itu komite dituntut untuk mendukung dan mewujudkan terlaksananya program kerja yang dirancang pihak sekolah dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Dukungan dan perwujudan tersebut dilakukan setelah komite sekolah memahami informasi kondisi objektif sekolah, selanjutnya melakukan pengkajian terhadap program kerja dalam bentuk RAPBS tersebut.

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap komite sekolah di MAN 2 Model Banjarmasin ternyata bantuan dana untuk berbagai macam kepentingan program sekolah cukup banyak didapatkan dari komite madrasah. Bantuan tersebut sangat berfungsi mendukung operasional sekolah atas kekurangan dari bantuan pemerintah.

Bantuan dana yang diberikan oleh komite MAN 2 kepada pihak sekolah berupa bantuan program kesejahteraan para guru, program pemeliharaan, dan program kegiatan-kegiatan sekolah termasuk program kegiatan kesiswaan. Bantuan dari pemerintah terhadap semua program tersebut sangat minim, tanpa didukung oleh bantuan dana komite MAN 2 Model dapat dipastikan semua program yang menjadi kegiatan sekolah tidak akan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak sekolah.

Seiring dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian *“Eksistensi Komite Sekolah Dalam Manajemen Keuangan Sekolah*

Pada MAN 2 Model Banjarmasin Di Kota Banjarmasin”, dengan alasan sebagai berikut:

1. MAN 2 Model merupakan satu-satunya sekolah agama tingkat atas yang dijadikan sekolah model di Kota Banjarmasin yang tentunya dengan model tersebut tidak hanya sekadar berbeda nama dengan MAN lainnya, tetapi berbeda dari berbagai aspek programnya.
2. Aspek program yang dijadikan model oleh MAN 2 Model Kota Banjarmasin adalah aspek program yang berkaitan dengan keterampilan seperti keterampilan elektronik, keterampilan menjahit, keterampilan dalam bidang informasi teknologi khususnya yang berhubungan dengan komputer. Semua keterampilan tersebut tentu tidak seratus persen dibiayai oleh pemerintah, dan dapat dipastikan pembiayaan tersebut melibatkan pihak komite sekolah.
3. Disamping aspek program yang dijadikan model, umumnya program-program sekolah seperti program kegiatan pembelajaran dalam bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana merupakan program yang selalu menjadi program tahunan sekolah. Untuk dapat terealisasinya program tersebut selama ini sekolah tidak hanya berharap dengan bantuan pemerintah, melainkan mengharapkan bantuan orang tua siswa, masyarakat melalui bantuan dana komite sekolah.
4. Kedua aspek program tersebut tentu melebihi dari pembiayaan dibanding pembiayaan program MAN lainnya di Kota Banjarmasin yang menjadi tanggung jawab komite sekolah khususnya komite sekolah MAN 2 Model Banjarmasin dibanding MAN lainnya.

B. Fokus Penelitian

Keberadaan komite sekolah MAN 2 Model dari sisi kemampuan membiayai program yang telah diprogramkan oleh sekolah, baik program yang berhubungan dengan aspek keterampilan, maupun yang berhubungan dengan aspek program tahunan sekolah tentu memerlukan dana yang cukup besar. Sementara program tersebut masih tetap dapat terealisasi dengan baik.

Terkait dengan realitas tersebut penulis mengangkat fokus masalah dalam penelitian dengan judul "*Eksistensi Komite Sekolah Dalam Penggalangan Dana MAN 2 Model Banjarmasin Di Kota Banjarmasin*" dengan subfokus upaya penggalangan dana dari orang tua siswa oleh komite MAN 2 Model dengan berbagai program, aktifitas dan sumber dananya.

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara konkrit eksistensi komite sekolah yang berhubungan dengan penggalangan dana pada MAN 2 Model Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara toeretis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoretis

- a. Untuk menjadi landasan pengembangan wawasan pengetahuan secara ilmiah terkait dengan eksistensi komite dalam manajemen keuangan komite secara universal di sekolah. Kajian ilmiah yang dititikberatkan pada merespons kajian kepustakaan dan argumen-

argumen yang logis sebagai alat analisis dari temuan-temuan penelitian di lapangan ini, yang pada gilirannya dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat dijadikan operasionalisasi yang bersifat konseptual dari sebuah ilmu pengetahuan, khususnya dalam manajemen keuangan komite sekolah di sekolah secara umum.

- b. Untuk dijadikan kajian-kajian teoritis dalam telaah pengembangan eksistensi komite sekolah dalam manajemen keuangan komite pada sekolah yang patut untuk diterapkan, sehingga terjadi kondisi yang dinamis yang melibatkan semua pihak dalam lembaga pendidikan yang notabene ada di sekolah. Dengan demikian eksistensi komite sekolah dalam manajemen keuangan komite sekolah terus berkembang sebagai implementasi dari realitas riil yang menjadi tuntutan masyarakat.
- c. Untuk dijadikan sarana penunjang landasan berpikir secara filosofis dalam memahami eksistensi komite sekolah sebagai sesuatu yang fungsional, sehingga mampu mengubah situasi sekolah yang tidak kondusif menjadi kondusif dalam proses pendidikan. Demikian juga dengan proses pembelajaran dan proses pembiasaan-pembiasaan yang tidak teraplikasi, menjadi teraplikasi dalam kehidupan warga sekolah, khususnya aplikasi eksistensi komite sekolah dalam manajemen keuangan komite sekolah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk menjadi masukan yang berharga, sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka menciptakan peran komite sekolah dalam penggalangan dana komite di semua madrasah pada umumnya dan MAN 2 Model Kota Banjarmasin pada khususnya.
- b. Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dalam rangka menciptakan program kerja sekolah yang terkait dengan penggalangan dana komite sekolah, sehingga komite sekolah dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi yang terstruktur di sekolah.
- c. Untuk mencari bentuk atau pola yang tepat bagi sekolah dalam rangka menciptakan peran komite sekolah dalam penggalangan dana komite sekolah, sehingga dapat menjadi model manajemen keuangan komite bagi semua Madrasah yang memiliki kesamaan karakteristik dengan MAN 2 Model Kota Banjarmasin, yang tidak terbatas hanya untuk kalangan Madrasah Aliyah Negeri saja, tetapi juga Madrasah Aliyah swasta.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian dalam tesis ini, penulis merasa perlu menegaskan ruang lingkup dan wilayah yang diteliti secara operasional, yaitu:

1. Eksistensi komite sekolah yang dimaksud di sini adalah: keberadaan komite sekolah yang berupa upaya penggalangan sumber dana dari orang tua siswa dengan berbagai program dan aktifitasnya pada MAN 2 Model Banjarmasin. Program ini mencakup: 1) Program kurikulum

dan kegiatan pembelajaran; 2) Program kesiswaan; 3) Program sarana dan prasarana; 4) Program ketatausahaan madrasah; 5) Program khusus komite MAN 2 Model Banjarmasin untuk komite.

2. Komite madrasah yang dimaksud dalam penelitian terdiri atas organisasi yang terdapat di suatu madrasah, yang semua kepengurusannya terdiri dari orang tua siswa MAN 2 Model Banjarmasin. Keberadaan komite tersebut dalam rangka menggalang dana dari orang tua siswa untuk kepentingan menunjang berbagai aktivitas, program sarana fisik dan nonfisik yang sudah di rencanakan oleh pihak MAN 2 Model Banjarmasin. Aktivitas mencakup: 1) Rapat pengurus dan rapat pleno anggota; 2) Aktifitas pelaksanaan program; 3) Aktifitas administrasi keuangan.
3. Penggalangan dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya dan aktifitas yang dilakukan oleh MAN 2 Model Banjarmasin untuk mengumpulkan dan mendapatkan dana lebih dari para wali atau orang tua siswa selain dana yang didapat dari pemerintah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini diawali dari dua aspek, yaitu aspek sisi sistematika penulisan dan aspek praktis pelaksanaan penggarapan tesis sebagai bahan laporan penelitian. Aspek sistematika penulisan hanya ingin menggambarkan bahwa penulisan tesis ini didasarkan pada urutan-urutan logis setelah penggarapan proposal. Oleh karena itu dalam sistematika penulisan urutan logisnya didahului

oleh bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metode penelitian, bab IV penyajian data, bab V analisis data, dan bab VI penutup, yang berisi; simpulan dan saran-saran.

Bab I pendahuluan, berisikan tentang kelogisan masalah yang memang layak diangkat ke dalam sebuah tesis, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara empirik, baik dilihat dari wawasan garapan keilmuan, maupun kaitannya dengan tesis-tesis yang terdahulu. Bab II, berisikan kajian pustaka, sebagai indikasi yang komprehensif dalam memahami eksistensi komite sekolah dalam penggalangan dana sekolah. Bab III, berisikan metode penelitian, sebagai rambu-rambu yang sangat urgen untuk memahami proses penggarapan tesis secara ilmiah. Bab IV, berisikan sejumlah data yang menggambarkan eksistensi komite sekolah dalam penggalangan dana MAN 2 Model Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada Bab V data tersebut dianalisis secara croscek dengan kajian kepustakaan dan proses berpikir penulis, sesuai dengan tuntuan berpikir ilmiah, sehingga menghasilkan data yang sangat komprehensif. Bab VI, berisikan simpulan yang komprehensif, sehingga memudahkan untuk memproyeksikan sasaran yang akan disarankan.

Aspek praktis, yaitu bagaimana tesis ini digarap secara ilmiah, melalui rencana yang matang dengan mamahami kondisional yang sesungguhnya terjadi, setelah mendalami realitas yang semestinya terjadi. Oleh karena itu diperlukan kemantapan metode dalam rangka menindaklanjuti antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang semestinya terjadi. Sesuatu yang sesungguhnya terjadi merupakan data yang disajikan dalam tulisan ini, sedangkan yang mestinya terjadi

adalah analisis yang diarahkan untuk memahami data-data yang diperoleh. Artinya, objek yang menentukan metode yang dipilih dalam penelitian, sehingga penelitian lebih bersifat objektif.

Data-data yang diperoleh ditelaah dengan alat analisis berupa kajian-kajian kepustakaan disertai dengan argumentasi pengalaman penulis sendiri. Kajian-kajian kepustakaan dan argumentasi dari pengalaman penulis dapat berfungsi “sebagai upaya memprevikasi data-data temuan, sehingga proyeksi analisis data tidak hanya apa yang sesungguhnya ada, tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal tersebut seperti itu.